



POLITIK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM DINASTI ABBASIYAH: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG SUMBER DANA, KENDALI NEGARA, DAN DAMPAK INTELEKTUALNYA

Fajrian Aminuddin¹⁾, Ali Hasan Assidiqi²⁾

¹⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
Email: 250101210031@student.uin-malang.ac.id

²⁾Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
Email: aliuinmalang@gmail.com

Abstract

Studies of Islamic education during the Abbasid Dynasty have generally highlighted educational institutions and prominent scholars, while the relationship between political authority and education financing remains relatively underexplored. Yet the intellectual progress of the period cannot be separated from a financing system supported by state policy. This study examines the forms and sources of education financing, the role of political authority in managing and controlling it, and its impact on educational access and Islamic intellectual development. It employs a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method following the PRISMA stages. Of 57 articles identified through Google Scholar, Sinta, and Scopus, seven articles and one main book met the inclusion criteria and were analyzed descriptively, historically, and analytically. The findings show that education was financed through the Baitul Mal, waqf, and public donations, managed in a structured manner by political authorities. Political authorities regulated the distribution of educational resources, supported the establishment of institutions, supervised the use of funds, and guided scholarly development, leaving the financial autonomy of educational institutions limited. These policies led to the growth of centers of learning, the emergence of multidisciplinary scholars, and an integrative Islamic intellectual tradition shaped by the bayani, burhani, and irfani approaches. The study concludes that Islamic intellectual progress in the Abbasid period resulted from a synergy between political stability, education financing governance, and state support for the advancement of knowledge.

Keywords: Abbasid dynasty; Education financing; Islamic education; Political authority

Abstrak

Kajian pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah umumnya menyoroti kemajuan lembaga pendidikan dan tokoh ilmuwan, sedangkan hubungan antara otoritas politik dan pembiayaan pendidikan masih relatif terbatas dibahas. Padahal, kemajuan intelektual Islam pada masa tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem pembiayaan yang didukung kebijakan politik negara. Penelitian ini bertujuan menelaah bentuk dan sumber pembiayaan pendidikan, peran otoritas politik dalam pengelolaan dan pengendalian pembiayaan tersebut, serta dampaknya terhadap akses pendidikan dan perkembangan intelektual Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada tahapan PRISMA. Dari 57 artikel yang teridentifikasi melalui Google Scholar, Sinta, dan Scopus, diperoleh 7 artikel dan 1 buku induk yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis secara deskriptif, historis, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan bersumber dari baitul mal, wakaf, dan donasi masyarakat yang dikelola secara terstruktur oleh otoritas politik. Otoritas politik berperan mengatur distribusi sumber daya, mendukung pendirian lembaga pendidikan, mengawasi pengelolaan dana, serta mengarahkan perkembangan keilmuan, sehingga otonomi finansial lembaga pendidikan tetap terbatas. Kebijakan tersebut berdampak pada berkembangnya pusat-pusat ilmu pengetahuan, lahirnya ilmuwan multidisipliner, dan terbentuknya tradisi intelektual Islam yang integratif melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Temuan ini menunjukkan bahwa kemajuan intelektual Islam pada masa Abbasiyah merupakan hasil sinergi antara stabilitas politik, tata kelola pembiayaan pendidikan, dan dukungan negara terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Dinasti Abbasiyah; Pembiayaan pendidikan; Pendidikan Islam; Otoritas politik



PENDAHULUAN

Masa Dinasti Abbasiyah sering diposisikan sebagai periode keemasan peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kemajuan tersebut tidak hanya ditandai oleh lahirnya ilmuwan besar dan berkembangnya disiplin ilmu rasional maupun keagamaan, tetapi juga oleh terbentuknya institusi pendidikan yang terorganisasi dan didukung secara sistematis oleh negara. Keberadaan pusat keilmuan seperti Bayt al-Hikmah serta madrasah-madrasah besar menunjukkan bahwa pendidikan pada masa itu telah memasuki fase institusional yang matang. Namun, kemajuan tersebut tidak dapat dipahami sebatas pengaruh budaya suatu daerah ataupun religius agama Islam, melainkan juga berhubungan erat dengan struktur kekuasaan dan kebijakan politik yang menguasainya.

Dinasti Abbasiyah tidak hanya berperan sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai patron utama dalam pembiayaan pendidikan (Rusyanti dkk., 2026). Dana negara melalui Baitul Mal dialokasikan untuk membiayai gaji ulama, pengadaan fasilitas belajar, pembangunan masjid jami', hingga pendirian madrasah. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan bukanlah persoalan administratif semata, melainkan bagian dari strategi politik untuk membangun legitimasi dan stabilitas ideologis. Menurut Murtopo, (2014) Madrasah Nizhamiyah, tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai instrumen konsolidasi mazhab dan reproduksi elite birokrasi. Artinya, terdapat relasi struktural antara otoritas politik dan arah pengembangan pendidikan.

Beberapa penelitian tentang pendidikan Abbasiyah umumnya menekankan faktor kejayaan intelektual, gerakan penerjemahan, dan produktivitas ilmuwan. Namun, pembahasan mengenai bagaimana sistem pembiayaan dirancang, siapa yang mengendalikan alokasi dana, serta bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi orientasi kurikulum dan kelembagaan masih relatif terbatas. Padahal, dalam perspektif ekonomi-politik pendidikan, distribusi sumber daya selalu mencerminkan prioritas kekuasaan. Ketika negara menjadi aktor dominan dalam pembiayaan, maka pendidikan akan mudah untuk dipengaruhi kontrol politik.

Jika ditinjau pada sisi ekonomi dan politik pendidikan, pembiayaan pendidikan tidak bisa dipahami sebatas sistem administratif, melainkan sebagai sistem strategis yang menggambarkan relasi kekuasaan dan orientasi kebijakan suatu pemerintahan. Struktur sumber dana, pola distribusi anggaran, serta sistem pengelolaannya menunjukkan prioritas politik yang ingin dicapai oleh penguasa. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai aktor utama yang tidak hanya menyediakan sumber daya, tetapi juga menentukan arah produksi dan legitimasi keilmuan. Sehingga, analisis pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan ideologi yang saling terkait.

Pada praktik operasional sistem pembiayaan menunjukkan standar remunerasi yang relatif seragam di berbagai wilayah kekhalifahan. Sebagaimana penelitian oleh Kawakib, (2014) Para guru besar di lembaga pendidikan tinggi hukum, misalnya, menerima gaji sekitar sepuluh dinar per bulan. Keceragaman ini dimungkinkan karena sumber pendanaan institusi berasal dari pemasukan yang relatif stabil, seperti hasil wakaf, sewa properti, serta hasil pertanian. Ketika terjadi surplus pada tahun-tahun dengan pendapatan tinggi, kelebihan tersebut disimpan untuk menutupi kekurangan pada periode dengan pemasukan rendah. Pola ini menunjukkan adanya mekanisme manajerial yang terencana, sehingga pembayaran gaji tenaga akademik dan pengelola lembaga dapat berlangsung secara konsisten.

Pola pembiayaan yang terstruktur tersebut juga berdampak pada diferensiasi akses pendidikan di lingkungan Abbasiyah. Terdapat perbedaan mendasar antara lembaga pendidikan tinggi hukum yang berada dalam sistem pendanaan negara dan institusi pendidikan adab yang berkembang di luar skema subsidi resmi. Lembaga pendidikan hukum yang memperoleh dukungan finansial dari negara dan wakaf umumnya membebaskan mahasiswa dari biaya studi, bahkan menyediakan beasiswa, fasilitas tempat tinggal, serta kebutuhan konsumsi secara cuma-cuma (Ramadhani dkk., 2023). Skema ini menunjukkan bahwa negara secara sadar membuka akses pendidikan hukum yang menjadi fondasi legitimasi sosial dan birokrasi bagi kelompok ekonomi lemah. Sebaliknya, pendidikan adab yang berada di luar jaringan subsidi tersebut sering kali menetapkan biaya yang tinggi dan lebih mudah diakses oleh kalangan berada.

Pada sistem pembiayaan masa Dinasti Abbasiyah menunjukkan kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Negara menyediakan subsidi langsung melalui Baitul Mal, sementara mekanisme wakaf berkembang sebagai sumber pendanaan yang relatif otonom. Akan tetapi, wakaf dalam banyak kasus tetap berada dalam kerangka legitimasi politik penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi finansial institusi pendidikan bersifat terbatas dan tetap terhubung dengan kepentingan stabilitas negara. Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pendidikan Abbasiyah tidak terlepas dari desain politik fiskal yang terintegrasi antara kekuasaan, ekonomi, dan ideologi.

Jika ditinjau melalui perspektif teori pembiayaan pendidikan, struktur sumber dana, sistem pengelolaan, serta pola distribusi anggaran tidak pernah bersifat netral, melainkan merefleksikan arah kebijakan dan kepentingan otoritas yang mengendalikannya. Sebagaimana buku yang ditulis oleh Rojii et al., (2020) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi pendidikan menegaskan alokasi anggaran merupakan representasi konkret dari prioritas sosial dan politik suatu rezim. Dengan kerangka ini, pembiayaan pendidikan pada masa Abbasiyah dapat dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai instrumen politik-ekonomi yang dirancang



untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, menjaga stabilitas ideologis, serta membangun dominasi intelektual dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan bahwa kajian tentang pendidikan masa Abbasiyah lebih banyak berfokus pada narasi besar kejayaan intelektual, seperti gerakan penerjemahan dan peran institusional Bayt al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fauzi dkk., (2025) dalam artikel "*Building Civilization Through Libraries*" riset yang ada sering kali mendokumentasikan Bayt al-Hikmah sebatas fungsinya sebagai perpustakaan dan pusat penerjemahan. Sehingga, Pembahasan mengenai mekanisme internal pendidikan, seperti struktur kurikulum, metode pedagogis yang interaktif, dan dinamika epistemologis antara ilmu rasional (*aqliyah*) dan ilmu agama (*naqliyah*), masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Pemetaan penelitian yang lain yakni hanya sebatas menjelaskan kondisi sosial politik, dan hubungan secara umum dengan Pendidikan Islam, sebagaimana artikel oleh Dardiri dkk., (2023) yang hanya berfokus pada kondisi sosial, politik, hubungan kekuasaan antara pemerintah dan ilmu pengetahuan. Penelitian tersebut membahas mengenai dinamika pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah yang saat ini masih didominasi oleh kajian mengenai pengaruh ideologi, perseteruan golongan, serta peran institusi seperti Bait al-Hikmah dan Madrasah Nizamiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan penelitian dalam artikel ini berfokus pada beberapa aspek penting terkait pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. *Pertama*, mengkaji bagaimana bentuk dan sumber pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. *Kedua*, menelaah peran otoritas politik dalam mengatur dan mengendalikan pembiayaan lembaga pendidikan. *Ketiga*, membahas kebijakan pembiayaan tersebut memengaruhi akses pendidikan serta arah pengembangan keilmuan pada masa Abbasiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara otoritas politik dan pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah. Pendekatan kualitatif digunakan karena berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan historis melalui analisis berbagai sumber data yang relevan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci serta menekankan makna dibandingkan generalisasi. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur secara sistematis, terstruktur, dan dapat direplikasi sehingga menghasilkan temuan yang

lebih objektif dan berbasis bukti dibandingkan kajian literatur konvensional.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada beberapa basis data akademik, seperti Google Scholar, DOAJ, dan repository jurnal ilmiah terbuka, dengan menggunakan kata kunci "pembiayaan pendidikan Islam", "Dinasti Abbasiyah", dan "politik pendidikan Islam". Proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan penentuan literatur yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) sebagaimana juga telah dijelaskan oleh Matthew (2021). Pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian topik, kualitas tulisan, serta aktualitas penelitian, sementara sumber non-ilmiah dan publikasi yang tidak memiliki landasan konseptual yang kuat tidak disertakan. Berikut tabel 1 yang menjelaskan pemilihan literatur tersebut.

Tabel 1. Hasil Analisis Literatur

Sumber	Kata Kunci	Pencarian	Jumlah Temuan
Google Scholar	Pembiayaan Pendidikan, Dinasti Abbasiyah, dan politik	Pembiayaan pendidikan Islam, Dinasti Abbasiyah, dan politik pendidikan Islam	43
Sinta	Pembiayaan Pendidikan, Dinasti Abbasiyah, dan politik	Pembiayaan pendidikan Islam, Dinasti Abbasiyah, dan politik pendidikan Islam	11
Scopus	Pembiayaan Pendidikan, Dinasti Abbasiyah, dan politik	Pembiayaan pendidikan Islam, Dinasti Abbasiyah, dan politik pendidikan Islam	3

Proses seleksi literatur dilakukan dengan mengacu pada empat tahapan PRISMA, yaitu identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, historis dan analitis untuk menghasilkan pemahaman mengenai Otoritas Politik dalam Pembiayaan Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah. Dari total 57 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, setelah penyaringan berdasarkan judul, ruang lingkup dan abstrak maka diperoleh 23 artikel. Selanjutnya, pada tahap penilaian kelayakan, 14 artikel dinilai relevan dan dianalisis lebih lanjut melalui pembacaan teks lengkap. Hasil akhir menunjukkan bahwa 4 artikel dan 1 buku



induk yang memenuhi kriteria inklusi dan digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian.

Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan untuk memastikan relevansi, aktualitas, serta kualitas literatur yang digunakan. Studi yang dipilih harus membahas topik mengenai otoritas politik dalam pendanaan pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, tersedia dalam format teks lengkap, serta menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Detail lengkap mengenai parameter kriteria tersebut disajikan pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Kriteria Literatur

Kriteria	Inklusi	Eklusi
Jenis publikasi	Jurnal ilmiah, Berita, artikel buku akademik, opini, blog non-prosiding, karya akademik klasik	
Fokus analisis	Otoritas Politik, Topik diluar Pembiayaan Otoritas Politik, Pendidikan Islam, Pembiayaan Dinasti Pendidikan Islam, Abbasiyah Dinasti Abbasiyah	
Hasil temuan	Temuan mengenai Otoritas atau kebijakan fakta sejarah atau politik dalam teori tanpa bukti pembiayaan penguat, tidak pendidikan Islam berhubungan pada Dinasti dengan Otoritas Abbasiyah atau kebijakan politik dalam pembiayaan pendidikan Islam pada Dinasti Abbasiyah	
Aksesibilitas	Teks lengkap tersedia	Teks tidak dapat diakses sepenuhnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa artikel dan satu buku induk yang paling relevan dalam membahas sejarah Arab. Adapun hasil dari *literature review* dengan tema politik pembiayaan Pendidikan Islam Dinasti Abbasiyah. Dijelaskan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Literatur

NO	Penulis	Judul	Temuan Utama dan Novelty
1	Reni Dwi Anggraini, Ahmad Nurul Kawakib	<i>Islamic Education at the Nizhamiyah Madrasah</i>	Novelty artikel ini terletak pada fokusnya terhadap relasi antara pola pembiayaan

		<i>during the Abbasid Era: Models of Financing, Curriculum Design, and Pedagogical Priorities</i>	pendidikan dan pembentukan kurikulum Madrasah Nizhamiyah, namun belum menyentuh otoritas politik dalam pembiayaan pendidikan
2	Nurul Kawakib	Politik Pendidikan Islam pada Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah: Politik Ketenagaan	Artikel tersebut lebih menitikberatkan pada aspek politik ketenagaan dan kualitas guru, bukan pada otoritas politik dalam distribusi anggaran pendidikan
3	Mochamad Taufik & Herwina Bahar	Peran Khalifah, Madrasah, dan Baitul Hikmah dalam Membangun Sistem Pendidikan di Era Abbasyiah	Artikel ini berfokus pada pendekatan tiga elemen utama pendidikan Abbasiyah, yaitu khalifah, madrasah, dan Baitul Hikmah, serta memiliki fokus utama pada kolaborasi kelembagaan.
4	Abdul Ghofur, Khoirudin Nasution, dan Makmun Efendi	<i>The Epistemology of Medieval Islamic Education: Historical Portraits of the Abbasid Dynasty During Caliph Harun Ar-Rashid</i>	Fokus utama artikel ini yakni pada epistemologi pendidikan Islam dan pemetaan corak pengetahuan bayani, burhani, serta irfani sebagai fondasi intelektual pendidikan Abbasiyah.
5	Philip K.Hitti	<i>History Of The Arabs : From The Earliest Times To The Present</i>	Buku ini membahas sejarah Arab secara utuh, termasuk pada pembahasan Dinasti Abbasiyah. Akan tetapi, masih general pada politik dalam pembiayaan pendidikan Islam.

4.1. Bentuk dan Sumber Pembiayaan Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah

Salah satu kesuksesan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah yakni didukung pada struktur pembiayaan



melalui Baitul Mal sebagai kas negara, peran khalifah dalam penentuan alokasi anggaran pendidikan, serta wakaf sebagai sumber dana permanen lembaga pendidikan (Lapidus, 1988).

Faktor lain juga mempengaruhi sumber pendapatan tambahan seperti hasil pertanian, sewa properti, dan donasi individu. Kajian oleh Efendi et al., (2025) juga menyoroti standarisasi gaji guru besar, sistem manajemen surplus-defisit anggaran, pola sentralisasi dan desentralisasi pembiayaan, serta perbedaan karakter pendanaan antara lembaga yang memperoleh subsidi negara dan lembaga non-subsidi.

Perkembangan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah tidak dapat dipisahkan dari sistem pembiayaan yang terorganisasi dengan baik. Kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memperoleh perhatian besar dari otoritas politik dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan, aktivitas ilmiah, penerjemahan buku, hingga kesejahteraan para ulama dan ilmuwan. Sistem pendanaan yang berkembang pada masa Abbasiyah memperlihatkan adanya keterlibatan negara dan masyarakat secara bersamaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang maju (Basri & Mansur, 2020). Kondisi ini menjadikan pendidikan bukan sekadar aktivitas keagamaan, tetapi juga bagian dari pembangunan peradaban Islam secara menyeluruh.

Jika ditinjau dalam *History of The Arabs* karya Philip K. Hitti (2002), sumber utama pendapatan Dinasti Abbasiyah berasal dari pajak negara yang dikelola melalui Baitul Mal. Pendapatan tersebut meliputi zakat, jizyah, kharaj, usyur, pajak perdagangan non-Muslim, serta uang tebusan dari wilayah taklukan. Di antara berbagai sumber tersebut, kharaj atau pajak tanah menjadi pemasukan terbesar negara karena wilayah pertanian Abbasiyah sangat luas dan produktif. Seluruh pendapatan negara kemudian dialokasikan oleh khalifah untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan lembaga pendidikan, penggajian guru, penyediaan fasilitas belajar, dan dukungan terhadap aktivitas keilmuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan pada masa Abbasiyah menjadi bagian penting dari otoritas politik dalam menopang pembiayaan pendidikan Islam.

Karakteristik pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa sumber pendanaan yang digunakan tidak bergantung pada satu sektor ekonomi tertentu. Diversifikasi sumber pendapatan negara melalui pajak, hasil pertanian, perdagangan, zakat, dan berbagai bentuk penerimaan lainnya menciptakan stabilitas fiskal yang memungkinkan pendidikan memperoleh dukungan secara berkelanjutan (Junita & Junita, 2025). Kondisi tersebut menjadikan lembaga pendidikan memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap perubahan ekonomi maupun politik. Ketersediaan sumber pembiayaan yang beragam juga memungkinkan pengembangan aktivitas keilmuan dalam skala yang lebih luas, mulai dari

penyelenggaraan pendidikan dasar hingga pengembangan pusat-pusat kajian ilmiah yang menjadi ciri khas kemajuan pendidikan pada masa Abbasiyah.

Bentuk pembiayaan pendidikan pada masa Abbasiyah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lengkap dan dukungan finansial secara langsung kepada para pendidik. Negara mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti madrasah, masjid, perpustakaan, serta pusat kajian ilmiah yang digunakan sebagai tempat belajar masyarakat (Tarigan dkk., 2023). Lembaga-lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran agama, tetapi juga sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Pemerintah memberikan dana operasional untuk pemeliharaan bangunan, penyediaan kitab, serta kebutuhan administrasi pendidikan lainnya.

Guru dan ilmuwan juga memperoleh gaji dari negara sehingga mereka dapat fokus dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Sistem ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai sektor strategis yang harus dijaga keberlangsungannya oleh kekuasaan politik (Asri dkk., 2024). Dana yang masuk ke baitul mal berasal dari berbagai sumber seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur, dan hasil pengelolaan wilayah kekuasaan Islam. Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk mendukung aktivitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan dana negara dalam pendidikan mencerminkan adanya kebijakan politik yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian penting dalam memperkuat peradaban Islam.

Bentuk pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya bersumber dari kas negara, tetapi juga ditopang oleh wakaf sebagai sumber dana yang berkelanjutan. Dana negara digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan seperti pembangunan lembaga pendidikan, penyediaan fasilitas belajar, serta pemberian dukungan finansial kepada para ilmuwan dan tenaga pendidik. Hal itu dikarenakan besarnya dukungan khalifah terhadap perkembangan pendidikan Dinasti Abbasiyah (Ratnasari dkk., 2025). Di sisi lain, wakaf berkembang menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan yang paling berpengaruh karena hasil pengelolaan asetnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk mendukung operasional lembaga pendidikan. Berkembangnya wakaf pendidikan juga menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari investasi sosial dan keagamaan.

Pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya diarahkan untuk kegiatan pengajaran, tetapi juga untuk mendukung berbagai aktivitas pendukung keilmuan. Dana pendidikan digunakan untuk pengadaan manuskrip, penyalinan kitab, pengembangan perpustakaan, serta penyediaan sarana belajar yang menunjang proses intelektual. Pengalokasian dana pada sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dipahami sebagai sistem yang memerlukan



dukungan infrastruktur akademik secara menyeluruh. Keberadaan fasilitas tersebut kemudian berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan tradisi ilmiah di berbagai pusat pendidikan Islam.

Secara garis besar, sumber pembiayaan pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah bersumber kebijakan politik pemerintah yakni dari wakaf, baitul mal, dan donasi masyarakat yang berorientasi sosial-keagamaan. Hal itu sebagaimana penelitian oleh Kawakib, (2014) yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan seperti madrasah dan perpustakaan dibiayai melalui dana wakaf untuk menggaji guru, menyediakan buku, serta memelihara fasilitas belajar. Sistem ini mencerminkan kerjasama antara negara dan masyarakat, menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama demi kemajuan ilmu dan peradaban Islam.

4.2. Peran Otoritas Politik dalam Pengelolaan Pembiayaan

Otoritas politik memiliki signifikansi strategis dalam menentukan arah kebijakan pendanaan yang tidak terlepas dari intervensi regulasi pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam baik (Sudiarti 2020). Hal itu juga terjadi pada zaman Dinasti Abbasiyah dimana Kekuasaan khalifah tidak hanya terbatas pada fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan dan distribusi sumber daya keilmuan. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kekuasaan, membangun kesejahteraan sosial, serta memperluas pengaruh peradaban Islam (Rusyanti dkk., 2026). Beberapa hal tersebut menyebabkan Dinasti Abbasiyah memiliki keterlibatan langsung dalam menentukan kebijakan pendidikan, mulai dari pengangkatan pengelola lembaga pendidikan hingga pengawasan terhadap aktivitas intelektual yang berkembang di tengah masyarakat. Hubungan antara politik dan pendidikan pada masa Abbasiyah menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan penguasa.

Khalifah memiliki kewenangan besar dalam menentukan prioritas pengembangan lembaga pendidikan dan aktivitas ilmiah. Penguasa Abbasiyah memberikan perhatian khusus terhadap pusat-pusat keilmuan karena dipandang mampu meningkatkan wibawa politik dan kemajuan peradaban Islam. Hal itu sebagaimana tulisan oleh Mochamad Taufik dan Herwina Bahar (2026) yang menyatakan bahwa Khalifah, Madrasah dan Baitul mal merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dalam membangun peradaban Dinasti Abbasiyah. Dukungan politik tersebut terlihat melalui pendirian lembaga pendidikan, perpustakaan, observatorium, serta pusat penerjemahan ilmu pengetahuan yang berada di bawah perlindungan negara. Situasi ini menjadikan Dinasti Abbasiyah berkembang sebagai pusat ilmu pengetahuan

dunia Islam yang mampu menarik perhatian ilmuwan dari berbagai latar belakang budaya dan disiplin ilmu.

Pengelolaan pembiayaan oleh otoritas politik juga berpengaruh terhadap distribusi sumber daya pendidikan di berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran memungkinkan berkembangnya lembaga pendidikan tidak hanya di pusat pemerintahan, tetapi juga di berbagai kota penting lainnya. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan sekaligus memperkuat integrasi sosial dan kultural di wilayah kekuasaan Islam. Melalui mekanisme ini, pendidikan menjadi sarana yang menghubungkan kepentingan politik pemerintahan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses keilmuan.

Peran otoritas politik juga tampak dalam pengawasan terhadap arah ideologi pendidikan yang berkembang pada masa Abbasiyah. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan kesatuan pemikiran masyarakat melalui lembaga pendidikan. Kurikulum dan aktivitas keilmuan dalam beberapa lembaga pendidikan diarahkan untuk memperkuat mazhab atau pemikiran tertentu yang didukung penguasa. Kondisi ini terlihat pada dukungan pemerintah terhadap pengembangan teologi Sunni pada beberapa periode pemerintahan Abbasiyah (Anggraini & Kawakib, 2024). Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai objek dalam berpolitik dan penyebaran ideologi negara. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas politik berpengaruh besar terhadap corak intelektual pendidikan Islam pada masa itu.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik pada suatu negara akan menunjukkan adanya administratif yang efektif dan efisien pada negara tersebut (Suningsih dkk., 2022). Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan agar tetap sesuai dengan kepentingan negara dan keberlangsungan lembaga pendidikan. Pengelola madrasah, perpustakaan, dan lembaga ilmiah biasanya berasal dari kalangan yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau memperoleh legitimasi dari pemerintah. Hal ini juga terjadi pada era Dinasti Abbasiyah dimana pengelolaan pendidikan tidak sepenuhnya bersifat independen, melainkan berada dalam pengaruh struktur politik pemerintahan. Kontrol negara terhadap pendidikan menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan stabilitas sosial dan intelektual di wilayah kekuasaan Abbasiyah.

Peran otoritas politik yang lain terjadi pada masa Abbasiyah yakni pada keberagaman intelektual dan budaya dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh nyata yakni yang terjadi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun yang memberikan ruang bagi para ilmuwan dari berbagai etnis, agama dan bangsa untuk saling bekerjasama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, masa pemerintahan al-Ma'mun



menjadi puncak kejayaan pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam sejarah Islam. Perkembangan lembaga pendidikan, perpustakaan, penerjemahan, dan diskusi ilmiah yang didukung oleh pemerintah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang berpengaruh hingga masa berikutnya

Otoritas politik pada masa Abbasiyah tidak hanya berperan sebagai penyedia sumber daya, tetapi juga sebagai aktor yang menentukan prioritas pembangunan pendidikan dalam skala negara. Penentuan lembaga mana yang memperoleh dukungan lebih besar, bidang ilmu yang mendapat perhatian khusus, serta wilayah yang menjadi pusat pengembangan pendidikan menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan politik dalam distribusi sumber daya pendidikan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari strategi pemerintahan dalam mengelola sumber daya manusia dan memperkuat posisi peradaban Islam di berbagai wilayah kekuasaannya.

Peran otoritas politik lainnya pada masa Dinasti yakni pada keberagaman intelektual dan budaya dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh kebijakan ini terjadi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun yang memberikan ruang bagi para ilmuwan dari berbagai etnis, agama, dan latar belakang budaya untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Al Jahra dkk., 2025). Dukungan politik tersebut menciptakan lingkungan intelektual yang terbuka dan dinamis melalui aktivitas penerjemahan, penelitian, serta diskusi ilmiah di berbagai lembaga pendidikan dan pusat keilmuan. Kondisi ini menjadikan masa pemerintahan al-Ma'mun sebagai salah satu puncak kejayaan pendidikan Islam, ditandai dengan berkembangnya perpustakaan, pusat riset, dan tradisi intelektual yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa-masa berikutnya.

4.3. Dampak Politik Pembiayaan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan Intelektual Islam

Kemajuan intelektual pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya lahir dari kecerdasan para ilmuwan, tetapi juga dibentuk oleh otoritas politik dan dukungan finansial negara yang sangat besar terhadap pendidikan. Pada masa ini, negara mampu membiayai penerjemahan manuskrip asing, mendirikan pusat-pusat ilmu pengetahuan, serta memberikan dukungan ekonomi kepada para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan intelektual Islam tidak berkembang secara spontan, melainkan dibangun melalui sistem pembiayaan pendidikan yang terorganisasi dan didukung langsung oleh otoritas politik. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan peradaban sehingga negara memiliki kepentingan besar terhadap arah perkembangan intelektual.

Perkembangan intelektual Islam pada masa Abbasiyah juga dipengaruhi oleh stabilitas sosial-politik yang mampu menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan (Hasibuan 2022). Stabilitas tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, penerjemahan karya klasik ke dalam bahasa Arab, serta dialog ilmiah antara ilmuwan dari berbagai budaya dan etnis. Aktivitas intelektual yang berkembang pada masa itu menjadikan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran formal, tetapi juga sebagai pusat pengembangan peradaban dan inovasi keilmuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik pembiayaan pendidikan yang didukung stabilitas sosial-politik mampu membentuk budaya intelektual yang luas serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan Islam hingga memberikan pengaruh terhadap perkembangan peradaban dunia.

Politik pembiayaan pendidikan pada masa Abbasiyah juga berkontribusi terhadap terbentuknya jaringan keilmuan yang menghubungkan berbagai wilayah dunia Islam. Ketersediaan dukungan finansial bagi lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat kajian memungkinkan terjadinya mobilitas pelajar maupun ilmuwan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu dan bertukar gagasan. Fenomena tersebut mendorong penyebaran pengetahuan secara lebih luas sekaligus mempercepat proses transfer keilmuan antarwilayah. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan tidak hanya menghasilkan kemajuan intelektual pada tingkat lokal, tetapi juga membentuk ekosistem akademik yang memperkuat integrasi dunia Islam melalui aktivitas keilmuan

Dampak politik pembiayaan pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah tidak hanya memengaruhi perkembangan pendidikan pada zamannya, tetapi juga menjadi rujukan bagi sistem pendidikan Islam pada periode-periode berikutnya. Salah satu dampak yang terjadi pada zaman Dinasti Abbasiyah yakni menjadikan Baghdad berkembang sebagai pusat intelektual dunia Islam yang melahirkan banyak ilmuwan dalam bidang tafsir, hadis, fiqh, filsafat, kedokteran, astronomi, dan sastra (Ichsan dkk., 2020). Dampak tersebut juga melahirkan ilmuwan Muslim yang berpengaruh dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan geografi. Kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas politik pembiayaan pendidikan berpengaruh dalam memperluas cakupan keilmuan sehingga pendidikan tidak hanya formalitas dalam lembaga, namun benar benar melahirkan inovasi pengetahuan dan melahirkan cendekiawan.

Perkembangan intelektual yang didukung oleh sistem pembiayaan pendidikan juga mendorong lahirnya spesialisasi dalam berbagai cabang keilmuan. Ketersediaan fasilitas belajar, perpustakaan, serta dukungan terhadap aktivitas penelitian memungkinkan para ilmuwan untuk mendalami bidang ilmu tertentu secara lebih intensif. Akibatnya, ilmu pengetahuan tidak lagi berkembang dalam bentuk pengetahuan umum yang terbatas, tetapi mulai



melahirkan disiplin-disiplin yang memiliki objek kajian, metode, dan tradisi akademik tersendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa politik pembiayaan pendidikan berperan dalam mempercepat diferensiasi keilmuan yang kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu-ilmu Islam maupun ilmu rasional pada periode-periode berikutnya.

Perkembangan intelektual yang pesat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pada masa Abbasiyah telah bertransformasi menjadi sarana produksi pengetahuan yang didukung oleh kebijakan negara. Aktivitas ilmiah tidak berhenti pada proses pembelajaran di lembaga pendidikan, tetapi berkembang menjadi tradisi penulisan, pengkajian, dan penyebaran ilmu yang melibatkan berbagai kalangan intelektual. Dukungan politik terhadap kegiatan keilmuan menciptakan hubungan yang erat antara kekuasaan dan produksi pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam memperkuat peradaban Islam (Asy'ari & Mufid, 2024). Kondisi ini menjelaskan mengapa kemajuan intelektual Abbasiyah tidak hanya menghasilkan banyak ilmuwan, tetapi juga melahirkan tradisi akademik yang mam

Kemajuan intelektual yang lahir dari kebijakan pembiayaan pendidikan juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan sosial dan pembangunan peradaban. Berbagai ilmu yang berkembang pada masa Abbasiyah, seperti kedokteran, matematika, astronomi, geografi, dan administrasi pemerintahan, tidak hanya menghasilkan karya akademik, tetapi juga digunakan untuk menjawab kebutuhan praktis masyarakat. Pengetahuan tersebut berkontribusi pada peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan ekonomi, sistem birokrasi, hingga pengembangan teknologi pada masanya (Junita & Junita, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa investasi politik dalam pembiayaan pendidikan menghasilkan efek multidimensional karena perkembangan intelektual tidak berhenti pada lingkungan akademik, melainkan turut memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dalam membangun peradaban Islam yang maju.

Politik pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah juga berdampak pada berkembangnya corak epistemologi pendidikan Islam yang melahirkan beragam tradisi keilmuan secara seimbang. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya pendekatan bayani, burhani, dan irfani (Ghofur dkk., 2021). Adanya pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik dan pembiayaan pendidikan pada masa Abbasiyah tidak hanya melahirkan perkembangan lembaga pendidikan, tetapi juga membentuk sistem intelektual Islam yang terbuka terhadap pengembangan berbagai disiplin ilmu. Keseimbangan antara pendekatan tekstual, rasional, dan spiritual tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kejayaan intelektual Islam serta memperluas pengaruh peradaban Abbasiyah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

Perkembangan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah juga memberikan pengaruh jangka panjang

terhadap arah perkembangan intelektual hingga masa sekarang. Tradisi ilmiah yang dibangun melalui dukungan politik dan pembiayaan pendidikan pada masa tersebut melahirkan budaya akademik seperti penelitian, penerjemahan, diskusi ilmiah, dan pengembangan multidisiplin ilmu yang masih menjadi dasar dalam sistem pendidikan modern. Banyak konsep keilmuan dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan pendidikan yang berkembang pada masa Abbasiyah kemudian menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia, termasuk dalam tradisi akademik Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik pembiayaan pendidikan pada masa Abbasiyah tidak hanya berdampak pada kemajuan intelektual di zamannya, tetapi juga membentuk fondasi perkembangan ilmu pengetahuan global serta memengaruhi pola pengembangan pendidikan dan tradisi intelektual hingga era kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah memiliki peran besar dalam membentuk perkembangan pendidikan dan kemajuan intelektual Islam. Bentuk dan sumber pembiayaan pendidikan berasal dari baitul mal, wakaf, serta donasi masyarakat yang digunakan untuk mendukung pembangunan lembaga pendidikan, penyediaan fasilitas belajar, dan kesejahteraan ilmuwan. Otoritas politik berperan aktif dalam mengatur distribusi pembiayaan, menentukan arah kebijakan pendidikan, mengawasi aktivitas intelektual, hingga membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari strategi pembangunan peradaban Islam. Kebijakan pembiayaan tersebut berdampak pada berkembangnya budaya akademik, lahirnya ilmuwan multidisipliner, terbentuknya tradisi epistemologi Islam yang integratif melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani, serta menjadikan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia Islam. Politik pembiayaan pendidikan pada masa Abbasiyah juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan tradisi ilmiah dan sistem pendidikan modern hingga masa kontemporer.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan studi literatur sehingga pembahasan lebih menekankan aspek konseptual dan historis tanpa analisis empiris mengenai implementasi politik pembiayaan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam modern. Kajian ini juga masih terbatas pada aspek otoritas politik dan pembiayaan pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyah tanpa melakukan perbandingan dengan dinasti Islam lainnya. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada analisis komparatif politik pembiayaan pendidikan antarperadaban Islam, pengaruh kebijakan pendidikan Abbasiyah terhadap sistem pendidikan modern, maupun kajian empiris mengenai relevansi model pembiayaan pendidikan Islam klasik terhadap pengembangan pendidikan Islam kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Jahra, F., Khairani, S., & Ifendi, M. (2025). Masa Keemasan Intelektual Islam: Studi Historis Pendidikan Islam pada Era Khalifah Al-Ma'mun. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(3), Hal.189-198.
<https://doi.org/10.61132/reflection.v2i3.1138>
- Anggraini, R. D., & Kawakib, A. N. (2024). Islamic Education at the Nizhamiyah Madrasah during the Abbasid Era: Models of Financing, Curriculum Design, and Pedagogical Priorities. *El-Suffah: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 306–312.
<https://doi.org/10.70742/suffah.v2i1.185>
- Asri, N., Rizkiyah, A. M., & Roza, E. (2024). Refleksi Pendidikan Dinasti Abbasiyah. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, 5(2), 541–549.
<https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.321>
- Asy'ari, H., & Mufid, M. (2024). Kebijakah Publik dan Produksi Pengetahuan: Studi Pemerintahan al-Nāṣir Khalifah Pertama Andalus. *JKII: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 9(2), 181–212.
<https://doi.org/10.14421/jkii.v9i2.1378>
- Basri, H., & Mansur. (2020). Manajemen : Sejarah Dan Penerapannya Dalam Dakwah. *Al-Munzir*, 12(2), 291–292. <https://doi.org/10.31332/am.v12i2.1480>
- Dardiri, M. A., Waluyo, & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Bani Abbasiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24, 69–82.
<https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Efendi, E. C., Hadi, W., Reveny, S., & Nelmawarn. (2025). The Glory Of Science In Classical Islamic Civilization: The Abbasid Dynasty As A Center For Innovation. *International Journal of Social and Education (INJOSEDU)*, 2(4).
<https://languar.net/index.php/INJOSEDU/article/view/172>
- Fauzi, A. A., Jinan, M., & Aryoseno, G. B. (2025). Building Civilization Through Libraries: The Role of Baitul Hikmah in Education During the Abbasid Era. *Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 18(3), 599–610.
<https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i3.2157>
- Ghofur, A., Nasution, K., & Efendi, M. (2021). The Epistemology of Medieval Islamic Education: Historical Portraits of the Abbasid Dynasty During Caliph Harun Ar-Rashid. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 28.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i10.2990>
- Hasibuan, N. H., Dewi, E., & Maksum, A. (2022). Islamic Education and Socio-Political Conditions of the Bani Abbasiyah Time. *MORFAI JOURNAL: Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issues MORFAI*, 454–463.
<https://doi.org/10.54443/morfai.v4i2.1775>
- Hitti, P. K. (2002). History Of The Arabs : From The Earliest Times To The Present. In *History of the Arabs*.
- Ichsan, Y., Hanafiah, Y., & Okfia, S. (2020). The Abbasid State ' s Contribution to Education : History , Policy , and Development of Islamic Educational Institutions. *At-Taqaddum*, Hal.86.
<https://pdfs.semanticscholar.org/4401/9c832642fbd94bc2758e4eae92374f99c03d.pdf?utm>
- Junita, S., & Junita, S. (2025). Peradaban Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Sebagai Fondasi Ekonomi Syariah Modern. *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1849–1862.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1861>
- Kawakib, N. (2014). Politik Pendidikan Islam Pada Masa Kejayaan Dinasti Abbasiyah: Politik Ketenagaan. *J-PAI*, 1(1), Hal. 1-11.
<https://doi.org/10.18860/jpai.v1i1.3357>
- Lapidus, I. M. (1988). *A History of Islamic Societies*. The Press Syndicate Of The Universoty Of Cambridge.
- Murtopo, A. (2014). Politik pendidikan pada masa daulah abbasiyah (kasus madrasah nizhamiyah di baghdad). *Ta'dib*, XIX(02), Hal. 314.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/download/21/16/40>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *The Bmj*, 372, 13.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Ramadhani, A. F., Islam, U., Rahmat, R., Islam, U., & Rahmat, R. (2023). Manajemen pembiayaan dalam pendidikan islam. *International Seminar On Islamic Education And Peace (ISIEP)*, 3, Hal. 129-139.
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/isiep/article/view/3860>
- Ratnasari, I., Ahyar, A., Mirasari, T., Muslih, M., Fahrudin, F., Fauziah, A., & Septiyaningsih, R. (2025). Pendidikan Islam Pada Era Keemasan Abbasiyah: Studi Pustaka Terhadap Lembaga, Kurikulum, Dan Tokoh Ilmuwan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 6421–6428.
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.46538>
- Rojii, M., Nurdiyan, P., Islamiar, A. N., Anggraeni, N., & Wulandari, S. (2020). *Manajuemen Pembiayaan Pendidikan Islam*. UMSIDA Press.
- Rusyanti, S., Rambe, A. A., Aryani, G., & Roza, E. (2026). Faktor Kunci Keberhasilan Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah dan Relevansinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia: Suatu Analisis Historis-Filosofis. *Journal Scientific of Mandalika (jsm)*, 7(2), 319–335.
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol7iss2pp319->



335

- Sudiarti, S., Anwar, K. U., & Shaleh, A. S. (2020). Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di pengaruhi Oleh Politik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 1–13.
<https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i1.965>
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta Cv.
- Suningsih, Oktaria, N., Winarti, W., & Murtafiah, N. H. (2022). Konsep Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Islam. *Unisan Journal: Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01(04), 138–148.
<https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/665>
- Tarigan, M., Rambe, I. M., & Ramadani, S. V. (2023). Membingkai Sejarah Pendidikan Islam di Era Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Dirosah Islamiyah Volume*, 5, 704–713.
<https://doi.org/10.17467/jdi.v6i3.2355>
- Taufik, M., & Bahar, H. (2026). Peran Khalifah , Madrasah , dan Baitul Hikmah dalam Membangun Sistem Pendidikan di Era Abbasyiah. *Tafhim Al-Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 17(2), Hal. 368-380.
<https://doi.org/10.37459/tafhim.v17i02.321>